

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN COVID-19 OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI

Idham Imam Seputra

Program Studi Manajemen Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Indonesia

Abstrak

Fokus utama penelitian ini adalah membahas tentang Pengaruh Implementasi kebijakan terhadap efektivitas Penanggulangan Covid-19 oleh Pemerintah Daerah kabupaten Kerinci. pandemi virus corona telah ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020. Penelitian ini menggunakan dua variabel (1) variabel bebas adalah implementasi Kebijakan dengan indicator penelitian : komunikasi, disposisi, sumberdaya dan struktur birokrasi. (2) Variabel terikat adalah Efektivitas Kebijakan dengan indikator penelitian : keberhasilan dan dampak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan sampel sebanyak 60 responden. Populasi penelitian terbagi dalam dua kelompok yaitu pihak pelaksana kebijakan dan masyarakat. Data yang didapatkan kemudian dianalisa dengan menggunakan model regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan (1) efektivitas kebijakan penanganan virus Covid-19 yang diterapkan pemerintah kabupaten kerinci berada pada level sedang dengan skor rata-rata jawaban responden 62.3%. (2) nilai Pearson Correlation sebesar 0,859 sehingga derajat hubungan antar variabel adalah korelasi sempurna dan bentuk hubungan positif. (3) nilai R square sebesar 0.738 sehingga variabel implementasi kebijakan mempengaruhi 73.8% variabel efektivitas kebijakan.

Kata Kunci: penanggulangan covid-19; efektivitas kebijakan pemerintah; pemerintah kabupaten kerinci

Bencana bukanlah sebuah fenomena baru umat manusia (kusumasari, 2014). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bencana mempunyai arti sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan kesusahan, kerugian atau

penderitaan. Pandemi adalah wabah ppenyakit yang terjadi secara global. World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa pandemi dinyatakan ketika penyakit baru menyebar diseluruh dunia melampaui batas. Menurut KBBI Pandemi dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak di mana-mana meliputi daerah geografi yang luas.

Corona mulai menjadi epidemi pada desember 2019 yang kemudian menyebar keseluruh dunia hingga pada tanggal 12 Maret 2020 WHO mengumumkan bahwa Covid-19 menjadi pandemi setelah tercatat 169,610 kasus virus corona di seluruh dunia, dengan naiknya status corona menjadi pandemi WHO berharap negara-negara didunia bisa mengambil langkah ekstra untuk melawan ganasnya virus ini. Langkah awal yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia adalah dengan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dengan dikeluarkannya Keppres Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada tanggal 13 Maret 2020

yang kemudian diubah dengan Keppres Nomor 9 tahun 2020.

Pemerintah Indonesia menetapkan virus corona sebagai bencana nasional pada tanggal 13 April 2020 dengan ditanda tangannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Nonalam Penyebaran Covid-19 Sebagai bencana Nasional oleh presiden. Keputusan ini diambil mengingat angka penyebaran virus corona di Indonesia yang makin meningkat, tercatat hingga tanggal 12 April 2020 4.241 kasus positif virus Corona, 3.509 orang dalam perawatan dan 373 meninggal. Empat poin yang disampaikan presiden dalam keputusan ini yaitu :

1. Menyatakan bencana non alam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Vints Disease 2019 (COVID-19/ sebagai bencana nasional.
2. Penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Dsease 2019 (COWD-19) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan Keputtrsan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona

Virus Disease 2019 (COVID-19/ sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

3. Gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di daerah, cialam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah pusat
4. Keputusan Presiden ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Menindak lanjuti kebijakan tersebut Pemerintah kabupaten Kerinci mengeluarkan Himbauan Bersama tentang Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Kabupaten Kerinci. Surat dengan Nomor 88/Kesra/2020 yang ditandatangani Bupati Adirozal, Ketua DPRD Edminuddin, Dandim 0417/Kerinci Letkol Czi Fitriadi, Polres Kerinci AKBP Heru Ekwanto, Kajari Sungai Penuh Romi Arizyanto,

Ketua PN Sungai Penuh Dedi Kuswara dan Ketua PA Sungai Penuh Ikhsanuddin, Himbauan ini berisikan enam belas poin himbauan terkait kesehatan, social, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai Implementasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci diantaranya:

1. melakukan edukasi masyarakat terkatit virus corona dan perilaku hidup sehat melalui himbauan dan bekersama dengan tokoh masyarakat,
2. memperkatat akses masuk dan memaksimalkan pemantauan pada tiga akses masuk kabupaten kerinci yaitu yaitu jalur Bangko-kerinci, Solok Selatan Kerinci dan Tapan-kerinci,
3. menutup sementara objek wisata dan tempat hiburan melakukan pendataan dan isolaso terhadap warga yang masuk kabupaten kerinci
4. melarang penyebaran berota hoax melarang masyarakat untuk menimbun Sembako, masker dan hand sanitizer
5. menyiapkan anggaran tambahan penanganan virus corona dan membeli APD tambahan. Menyiapkan tempat isolasi alternative

Berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah belum memberikan dampak yang signifikan terhadap penanganan virus corona. Hingga tanggal 1 Mei 2020 tercatat 10.551 kasus positif dengan 800 korban meninggal dan 1.591 orang sembuh di seluruh Indonesia. Sementara di Provinsi Jambi terdapat 32 kasus positive corona dan 2 diantaranya adalah masyarakat Kabupaten Kerinci, jumlah ODP tercatat sebanyak 62 orang dan 1 orang PDP. Sementara itu Kota sungai Penuh yang merupakan pemekaran wilayah kabupaten kerinci memiliki satu orang positif corona, 7 ODP dan satu PDP. Ancaman penyebaran virus corona juga meningkat dengan datangnya musim mudik lebaran karena mayoritas masyarakat kabupaten Kerinci merantau keluar daerah.

Selain jumlah penderita positif yang semakin bertambah, berbagai sektor kehidupan juga terimbas akibat pandemi virus corona seperti sektor ekonomi, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya tokoh atau kios yang berhenti berjualan di pasar kabupaten kerinci karena rendahnya daya beli masyarakat.

Berhasilnya kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tentunya akan dipengaruhi oleh kerjasama berbagai pihak. Hal ini seperti

disampaikan Gibson bahwa Efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati sebagai usaha bersama. Tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas (Bernard H Russell, 1994) , sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas program-program yang diterapkan pemerintah kabupaten Kerinci dengan menghubungkannya dengan factor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan pemerintah. Menurut Edward III keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi (edward III, 1984). Dengan demikian penelitian ini dilakuka untuk mengetahui efektivitas Implementasi kebijakan penanggulangan corona virus disease 2019 (Covid-19) khususnya di Kabupaten kerinci.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan Teknik sampel purposive sampling. Untuk melakukan pengujian instrumen penelitian menggunakan rumus validitas yakni produk momen dan reliabilitas reliabilitas yakni Alpa Cronbach. Selanjutnya data dianalisis dengan rumus korelasi dan regresi. Populasi dalam penelitian ini Penelitian ini terbagi

menjadi dua kelompok yaitu kelompok pelaksana kebijakan dan masyarakat. Pihak pelaksana kebijakan adalah pemerintah kabupaten, dinas kesehatan, BNPB, TNI-POLRI, dan pemerintah desa sedangkan masyarakat yang dijadikan responden adalah perwakilan dari 16 kecamatan di kabupaten Kerinci.

HASIL DAN DISKUSI

Efektivitas adalah keberhasilan yang telah dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang sudah disusun sebelumnya. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (H.Emerson, 1994). Selain itu, efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah tercapai (Hidayat, 1986). Sehingga efektivitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan pencapaian sasaran. Hasil penelitian yang dilakukan pada ikatan pemerhati dan tokoh masyarakat kabupaten kerinci disajikan dalam beberapa pengujian yang digambarkan dalam tabel.

Pengujian pertama dilakukan dengan program aplikasi SPSS, hasil uji validitas dari masing-masing item pertanyaan disajikan pada tabel 1 dan 2.

Setelah instrument yang digunakan dinyatakan valid maka

dilanjutkan dengan uji reliabilitas. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih (Supardi, 2005). Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat Cronbach Alpha Coeficient menggunakan aplikasi SPSS. Reliabilitas sebuah data terjadi jika nilai Cronbach Alpha lebih besar atau sama dengan 0,6. Hasil uji reliabilitas disajikan dalam tabel 3. setelah instrument penelitian dinyatakan valid maka dilakukan Uji Asumsi Klasik untuk melihat tabulasi data, uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas untuk melihat apakah persebaran data berdistribusi normal atau tidak, sedangkan uji Autokorelasi dan Multikoleniaritas tidak diperlukan karena data penelitian tidak menggunakan time series dan variabel independent hanya satu. eteroskedastisitas

Setelah instrument yang digunakan dinyatakan valid dan reliabel maka dilakukan analisis uji t dan analisis regresi . untuk melihat pengaruh antara implemtasi kebijakan dan efektivitas kebijakan maka digunakan rumus $H_0 : \beta = 0$ untuk implementasi kabijakan tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kebijakan dan $H_1 : \beta \neq 0$ untuk

implemtasi kebijakan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kebijakan.

Tabel. 1 Uji Validitas Variabel Efektivitas kebijakan

Butir pertanyaan	R hitung	R table	keterangan
1	0,733	0,2542	Valid
2	0,769	0,2542	Valid
3	0,762	0,2542	Valid
4	0,790	0,2542	Valid

Tabel. 2 uji Validitas Variabel Implementasi Kebijakan

Butir pertanyaan	R hitung	R table	keterangan
1	0,876	0,2542	Valid
2	0,848	0,2542	Valid
3	0,910	0,2542	Valid
4	0,872	0,2542	Valid

Tabel. 3 Uji Reliabilitas

Variabel Penelitian	Croncbanch Alpa	Keterangan
Efektivitas Kebijakan (Y)	0,761	Reliabel
Implementasi Kebijakan (X)	0,899	Reliabel

Validitas dan reliabilitas menjadi syarat yang harus dilakukan sebelum uji korelasi dan regresi untuk menganalisis data, selain itu, instrument yang valid dan reliabel juga akan menghasilkan data dan hasil penelitian yang valid dan reliabel. Dengan mendeteksi validitas skor dalam penelitian survei, peneliti dapat mengetahui apakah instrumen yang digunakan benar-benar sudah tepat untuk penelitian surveinya (Creswell, 2013). Validitas item diukur dengan membandingkan antara r hitung dan r tabel dimana sampel penelitian ini berjumlah 60 orang dan r tabel adalah 0,2542 sehingga item valid jika r hitung > 0,2542. Dikatakan validitas suatu

instrument apabila r hitung lebih besar dari r tabel dengan tingkat signifikan sebesar 5% atau 0.05 (Sugiyono, 2011)

Hasil uji validitas terhadap variabel dependen yaitu Efektivitas kebijakan didapatkan bahwa r hitung setiap item yang digunakan lebih besar dari 0,2542, sehingga semua item dalam variabel Y dinyatakan valid. Item dengan nilai validitas paling tinggi adalah item pertanyaan nomor 4 yaitu 0,790 dan item dengan validitas terendah adalah item pertanyaan nomor 1 yaitu 0,733. Hasil uji validitas terhadap variabel independen yaitu Implementasi kebijakan didapatkan bahwa r hitung setiap item yang digunakan lebih besar dari 0,2542,

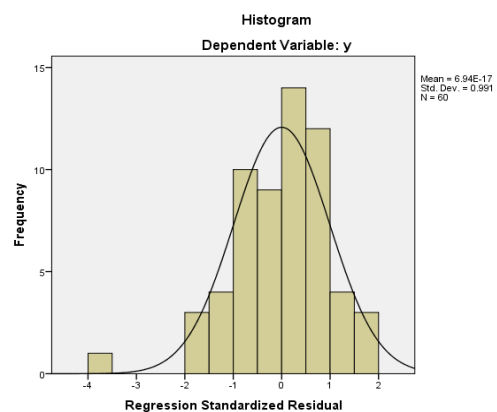
sehingga semua dalam variabel X dinyatakan valid. Item pertanyaan dengan nilai validitas paling tinggi adalah item pertanyaan nomor 3 yaitu 0,910 dan item dengan validitas paling rendah adalah item pertanyaan nomor 2 yaitu 0,848. Item pertanyaan yang digunakan pada variabel x dan y semuanya valid. Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas, uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah item pertanyaan yang digunakan pada kedua variabel reliabel atau tidak. Kuesioner dinyatakan variabel apabila dilakukan pengukuran ulang maka akan didapatkan hasil yang sama. Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan memabndikan nilai alpha cronbach's. Variabel dikatakan reliabel jika nilai alpha sama dengan atau lebih dari 0,6 (Usman dan Akbar, 2006).

Hasil uji reliabilitas terhadap variabel Efektivitas kebijakan adalah 0,761 sehingga nilai alpha lebih besar dari 0,6 maka variabel Efektivitas kebijakan dinyatakan reliabel. variabel Implementasi Kebijakan memiliki nilai alpha croncbanch sebesar 0,899 sehingga nilai alpha lebih besar dari 0,6 maka variabel Implementasi kebijakan juga reliabel.

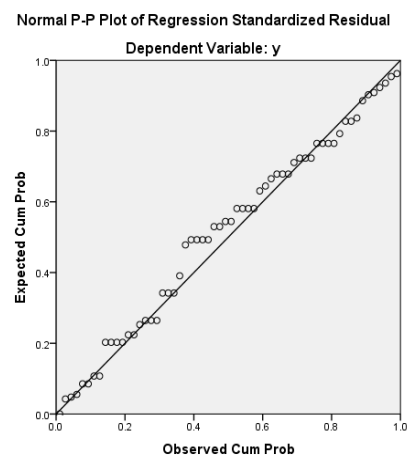
Hasil uji validitas terhadap variabel Dependen (efektivitas kebijakan) dan variabel independent (implementasi

kebijakan) didapatkan bahwa semua nilai r hitung item lebih besar dari pada r tabel sehingga semua item valid. Hasil uji reliabilitas kedua Variabel memiliki nilai Corncbanch Alpha lebih besar dari 0,6 sehingga kedua variabel yang digunakan reliabel. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik, uji asumsi klasik yang dilakukan hanya uji normalitas untuk melihat apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji asumsi klasik dilakukan dengan melihat histogram hasil uji regresi pada gambar 1 dan 2.

Gambar. 1



Gambar.2



Berdasarkan hasil uji histogram pada gambar 1 terlihat bahwa garis membentuk gunung dan kaki simetris maka data hasil penelitian berdistribusi normal. selanjutnya pada gambar 2 titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal sehingga data hasil penelitian memiliki distribusi normal. Selanjutnya dilakukan Tabel. 4

Correlations		Y	x
y	Pearson Correlation	1	.859**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	60	60
x	Pearson Correlation	.859**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	60	60

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan nilai signifikansi variabel Efektivitas kebijakan adalah $0,000 < 0,05$ dan variabel Impelementasi kebijakan nilai signifkasinya $0,000 < 0,05$ sehingga kedua variabel saling berkorelasi, artinya H_0 ditolak dan menerima H_1 . Dari tabel uji korelasi tersebut juga didapatkan bahwa nilai Pearson Corelation untuk variabel Efektivitas Kebijakan adalah 0,859 dan untuk variabel Implementasi Kebijakan adalah 0,859 sehingga derajat hubungan antar variabel ini adalah korelasi sempurna. Bentuk hubungan antara

uji korelasi untuk melihat hubungan antara kedua variabel dengan membandingkan nilai signifikansi, jika nilai sigfikasi lebih kecil dari 0,05 maka varibel berkorelasi, sebaliknya jika nilai signifikasi lebih dari 0,05 maka variabel tidak berkorelasi, hasil uji korelasi ditampilkan dalam tabel 4.

variabel dependen dan Independen adalah hubungan positif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa varibel Impelentasi Kebijakan dan Efektifitas kebijakan memiliki hubungan yang sangat kuat. Bentuk hubungan yang positif menunjukkan bahwa semakin meningkat implementasi kebijakan maka efektifitas kebijakan juga akan akan meningkat. Efektivitas adalah menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya" (Mahsun, 2006). Efektivitas

kebijakan akan tercapai jika pihak yang berwenang dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten Kerinci mampu mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan sasaran-sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, semakin besar dampak positif dari implelementasi kebijakan terhadap sasaran yang ingin dicapai maka akan semakin efektif kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kabupaten kerinci.

Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang dirancang sebelumnya, sebaliknya keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antar hasil akhir dari

program-program tersebut dengan tujuan-tujuan kebijakan, Sehingga kebijakan itu efektif jika mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ditetapkan (Solichin Abdul Wahab, 2012). Efektivitas kebijakan merupakan hasil dari implementasi kebijakan dan program-program yang telah dibuat sebelumnya, implelementasi kebijakan yang memberikan dampak positif sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan menunjukan bahwa kebijakan yang diterapkan telah efektif karena keberhasilan dalam penerapan program-program yang telah disusun.

Efektivitas kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kabupaten kerinci berdasarkan jawaban yang diberikan oleh 60 responden disajikan dalam tabel berikut.

Tabel. 5. Efektivitas kebijakan

Value					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	5	8.3	8.3	8.3
	2	31	51.7	51.7	60.0
	3	24	40.0	40.0	100.0
	Total	60	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 51.7% responden mengatakan efektivitas kebijakan adalah sedang, 40% responden mengatakan bahwa efektivitas kebijakan tinggi dan

8.3% responden mengatakan bahwa efektivitas kebijakan rendah. Nilai rata-rata yang didapatkan dari efektivitas kebijakan adalah 62.3%, sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan

penanggulangan virus corona yang diterapkan oleh pemerintah kabupaten kerinci adalah sedang.

Selanjutnya dilakukan uji regresi. Regresi digunakan untuk menentukan sifat –sifat dan kekuatan hubungan antara dua variabel serta memprediksi nilai dari

Tabel 6. Uji regresi model summary

suatu variabel yang belum diketahui dengan didasarkan pada observasi masa lalu terhadap variabel tersebut dan variabel-variabel lainnya (Rubin, 1998). Hasil uji korelasi di sajikan dalam tabel berikut.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.859 ^a	.738	.734	1.636

a. Predictors: (Constant), x

b. Dependent Variabel: y

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa besarnya nilai korelasi (R) 0.859 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara variabel efektivitas kebijakan dan implementasi kebijakan dengan total hubungan sebesar 0,463. Selanjutnya didapatkan nilai koefisien determinasi (R square) adalah 0.738 yang mengindikasikan bahwa pengaruh variabel

Tabel. 7 uji regresi coefficients

bebas (implementasi kebijakan) terhadap variabel terikat (efektivitas kebijakan) adalah sebesar 73.8 persen sementara sisanya sebesar 26.2 dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.209	.829		2.665	.010
x	.788	.062	.859	12.792	.000

a. Dependent Variabel: y

Dari tabel diatas diketahui nilai konstan (a) sebesar 2.209 sedangkan nilai variabel x (b) sebesar 0.788 sehingga persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut

$$Y = a + bX$$

$$Y = 2.209 + 0.788X$$

Persamaan regresi tersebut menunjukan bahwa konstanta sebesar 2.209 hal ini berarti bahwa nilai konsisten variabel Efektivitas adalah sebesar 2.209. selanjutnya nilai koefisien regresi X sebesar 0.788 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai Implementasi, maka nilai efektivitas bertambah sebesar 0.788. koefisien regresi tersebut bernilai positive sehingga arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah positif.

Berdasarkan nilai signifikansi yang didapatkan diperoleh nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Implementasi kebijakan (X) berpengaruh terhadap variabel efektivitas kebijakan (Y). berdasarkan nilai t, diketahui nilai t hitung sebesar 12.792 > 2.002 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Implementasi kebijakan (X) berpengaruh terhadap Efektifitas kebijakan (Y)

Variabel implelementasi kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap efektifitas kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kabupaten kerinci . Edward III menjelaskan bahwa terdapat empat factor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya impelmentasi kebijakan yaitu : faktor komunikasi (communication), sumber daya pelaksanaan (reseources), struktur birokrasi(bureaucratic structure), dan sikap pelaksana (dispotition) (edward III, 1984)

Faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan berkaitan dengan bagaimana pihak pelaksana kebijakan berkomunikasi baik secara bottom-Up untuk mengetahui apa yang harus dilaksanakan dan melaporkan perkembangan keadaan maupun top-down untuk menyampaikan informasi dan mensosialisasikan kebijakan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berhubungan dengan kebijakan. Komunikasi menjadi sarana bagi pelaksana kebijakan untuk saling bertukar informasi dan memberikan ide-ide masukan terkait kebijakan sehingga terjalin kerjasama yang baik pada internal pelaksana kebijakan maupun external dengan piahk yang terlibat dengan kebijakan ini.

Faktor sumberdaya akan sangat menentukan efektivitas implementasi kebijakan, sumberdaya dalam hal ini terbagi dua yaitu, sumberdaya finansial dan sumberdaya manusia. Sumberdaya finansial menjadi factor yang sangat krusial mengingat pandemi virus corona memerlukan biaya yang sangat mahal untuk menanganinya seperti pemenuhan fasilitas dan alat-alat kesehatan serta fasilitas umum untuk mencegah penyebaran virus. Selain itu, dampak luas pandemi ini mengakibatkan penurunan pada beberapa sektor kehidupan seperti sektor ekonomi, banyak masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya akibat pandemi sehingga kesejahteraan masyarakat juga menjadi tanggung jawab besar pemerintah. Sumberdaya manusia juga sangat berpengaruh dalam kebijakan ini, orang-orang yang ahli sangat dibutuhkan seperti dokter dan para petugas kesehatan yang mengurus pasien, pembuat kebijakan dan juru bicara untuk mengomunikasikan kebijan ini kepada masyarakat. Selain itu juga diperlukan peran petugas keamanan untuk membantu pelaksanaan tugas.

Faktor disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat mempengaruhi kebijakan ini karena

profesionalitas, komitmen dan tanggung jawab pelaksana kebijakan akan sangat dibutuhkan mengingat pandemi ini telah ditetapkan sebagai bencana nasional oleh presiden melalui Keppres No. 12 Tahun 2020 sehingga program-program kebijakan harus mampu disikapi secara tepat dan cerdas oleh pihak pelaksana kebijakan agar tercapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Factor struktur birokrasi juga akan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, struktur birokrasi yang jelas akan memberikan rantai komando yang jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam implementasi kebijakan karena mengikuti satu kesatuan perintah. Struktur birokrasi yang jelas juga akan memberikan kejelasan tanggung jawab pada tiap-tiap unit pelaksana sehingga tidak terjadi saling tumpang tindih tugas maka peran organisasi akan efektif dan efisien.

KESIMPULAN

Hasil analisis data mendapatkan koefisien korelasi sebesar 0,859 sehingga derajat hubungan antara variabel impelmentasi kebijakan terhadap efektivitas kebijakan adalah sempurna dan bentuk hubungan antara kedua variabel adalah positif.

Hasil uji regresi didapatkan nilai t hitung sebesar $12.792 > 2.002$ sehingga H_0 yang menyatakan bahwa implemementasi kebijakan tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kebijakan ditolak dan H_1 yang menyatakan bahwa implemementasi kebijakan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kebijakan. Implementasi kebijakan mempengaruhi 73.8% kebijakan sedangkan 26.2% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Berhasilnya kebijakan yang diterakan oleh pemerintah kabupaten kerinci akan sangat dipengaruhi oleh factor-faktor implementasi kebijakan yaitu komunikasi, disposisi, sumberdaya dan struktur birokrasi. Empat factor ini harus benar-benar diperhatikan dan dioptimalkan oleh pemerintah kabupaten kerinci agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka penanganan Corona Virus Diseases 2019 khususnya wilayah kabupaten kerinci dapat tercapai dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, J. W. (2013). Research Design Pendekatan Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. 1-308. file:///C:/Users/Hp/Documents/buku_creswell.pdf

Bernard H Russell. (1994). In Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches. California: SAGE Publications, Inc.

edward III, G. (1984). Implementing public policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.

H.Emerson. (1994). In S. Handyaningrat, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen (p. 16). Jakarta: Haji masagung.

Hidayat. (1986). In Teori Efektivitas kinerja Karyawan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

kusumasari, B. (2014). In Manajemen Bencana dan kapabilitas Pemerintah lokal. Yogyakarta: Gava Media.

Levin and Rubin. (1998). In L. r. s, Statistic For Management. 7th edition. Prentice-Hall International, Inc.

Mahsun, m. (2006). In Pengukuran Kinerja Sektor Publik (p. 188). Yogyakarta: Penerbit BPFE-Yogyakarta.

Solichin Abdul Wahab. (2012). In S. A. Wahab, ANALISIS KEBIJAKAN: Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Sugiyono, S. (2011). In Metode Penelitian (pendekatan, Kuantitatif, kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta.

Supardi, S. (2005). In Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: UII Press.

Usman dan Akbar. (2006). In U. d. Akbar, Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Askara.